

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI DESA WISATA WONOLOPO KOTA SEMARANG**
Adela Sanmutiane, Retna Hanani,R Slamet Santoso

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)
7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan tentang bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat dan faktor penghambat yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo. Desa Wonolopo dianggap masih terbelakang dibandingkan dari tiga Desa Wisata yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407 tahun 2012, yaitu Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Nongkosawit, dan Desa Wisata Wonolopo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tahap-tahap pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wisata Wonolopo serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo belum optimal. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, dan persaingan pasar. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal serta mengatasi kendala yang ada guna mencapai pengembangan pariwisata desa yang lebih optimal. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, Desa Wisata, pariwisata berbasis masyarakat, keberlanjutan.

Kata Kunci: *pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, Desa Wisata, pariwisata berbasis masyarakat, keberlanjutan*

ABSTRACT

This research is motivated by the question of how the stage of community empowerment and the inhibiting factors that affect community empowerment in Wonolopo Tourism Village. Wonolopo Village is considered to be still backward compared to the three Tourism Villages stipulated in the Mayor's Decree Number 556/407 of 2012, namely Kandri Tourism Village, Nongkosawit Tourism Village, and Wonolopo Tourism Village. The purpose of this study is to analyze the stages of empowerment carried out in Wonolopo Tourism Village and identify inhibiting factors and efforts that can be made to overcome these obstacles. Data was collected through field observations, interviews, and documentation. The data analysis technique uses triangulation to ensure the validity and reliability of the data. The results of the study show that community empowerment in Wonolopo Tourism Village is not optimal. Factors inhibiting community empowerment in Wonolopo Tourism Village include human resources, institutions, infrastructure, and market competition. Based on these results, effective strategies are recommended to increase local community participation and overcome existing obstacles to achieve more optimal village tourism development.

Keywords: *community empowerment, tourism development, Tourism Village, community-based tourism, sustainability.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pariwisata di Indonesia memiliki peluang besar karena potensi alam dan budaya yang melimpah. Namun, potensi ini harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat maksimal. Salah satu kunci keberhasilan adalah interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, pemerintah, dan pengusaha. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata mencakup seluruh kegiatan terkait yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, terutama masyarakat lokal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata. Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang ini menjelaskan bahwa pariwisata harus diselenggarakan dengan asas partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Masyarakat setempat yang tinggal di destinasi pariwisata harus mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pariwisata tersebut, menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam industri ini.

Tabel 1. 1 Desa Wisata Di Semarang

No	Kecamatan	Desa	Potensi Desa Wisata
1.	Gunung Pati	Cepoko	Kebun buah
2.	Gunung Pati	Jatirejo	Kuliner kolang-kaling
3.	Gunung Pati	Kandri	Wisata perahu
4.	Gunung Pati	Nongkosawit	Omah pang
5.	Mijen	Kedungpane	Curug Gondoriyo
6.	Mijen	Wonolopo	Agrowista
7.	Tugurejo	Tugurejo	Mangrove

Sumber : SIKENANG

Pemerintah Kota Semarang dan pemerintah daerah di Jawa Tengah berupaya mengembangkan pariwisata melalui pembangunan desa wisata. Desa Wisata Wonolopo adalah salah satu contoh di Kota Semarang dengan potensi budaya dan alam yang tinggi. Namun, pengembangan pariwisata di desa ini belum optimal karena kendala seperti minimnya infrastruktur, kurangnya pemasaran, dan keterlibatan masyarakat yang terbatas. Penelitian oleh Putri & Yuniningsih (2019) dan Pradana

(2016) menunjukkan bahwa masyarakat Wonolopo antusias, tetapi kerja sama antara masyarakat dan pengelola masih kurang.

Untuk mengatasi kendala ini dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan, diperlukan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT). CBT menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pariwisata. Masyarakat setempat menjadi tuan rumah bagi wisatawan dan menyediakan pengalaman wisata yang autentik dan berkesan.

Desa Wisata Wonolopo terletak di Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, sekitar 18 km dari pusat Kota Semarang. Dengan dataran hijau seluas 400,38 hektar, Wonolopo memiliki potensi pertanian dan alam yang besar. Pada tahun 2012, Wonolopo ditetapkan sebagai Desa Wisata bersama dengan Kandri dan Nongkosawit. Namun, perkembangannya belum optimal dibandingkan dengan dua desa lainnya.

Desa Wisata Wonolopo dibagi menjadi 10 RW, masing-masing dengan karakteristik dan

potensi unik, seperti budidaya bebek, embung Wonolopo, dan kampung jamu. Kampung jamu, dengan nilai historisnya, menjadi daya tarik utama yang tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga melestarikan tradisi pengobatan herbal. Pengembangan potensi ini dapat meningkatkan daya tarik Wonolopo sebagai destinasi wisata yang beragam dan menarik.

Pengembangan Desa Wisata Wonolopo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan keuntungan yang diterima dari program tersebut menjadi ukuran keberhasilan. Dengan pariwisata berbasis masyarakat, Wonolopo dapat memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang dimilikinya secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui peran sebagai pemandu wisata, penyedia akomodasi, pengrajin souvenir, dan penyedia makanan khas daerah.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan

dan budaya. Masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal sambil menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, aspek pengelolaan limbah, energi, teknologi ramah lingkungan, serta keamanan dan kenyamanan wisatawan harus diperhatikan. Dengan demikian, Wonolopo diharapkan menjadi destinasi wisata yang unik dan berkesan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang ?
2. Apa faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang ?
2. Apa faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang ?

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Paul C.Bartholomew (dalam Wirman Syafri, 2012:23-24) menyatakan Administrasi Publik menurut pengertian ilmu politik mempunyai dua arti. Dala arti luas, administrasi publik berarti pekerjaan-pekerjaan yang terliput di dalam (yang dilakukan dalam rangka) penanganan yang aktual terhadap masalah-masalah pemerintahan, dalam arti sempit, administrasi publik berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang administrasi saja, yakni kegiatan kepala eksekutif (kepala negara) dan para pejabat pembantuannya yang disebut administrator.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2010;8) mengatakan

bahwa Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

2. Manajemen Publik

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific manajement*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific manajemen*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning,

organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Manajemen publik memiliki fokus internal untuk membuat agar mesin pemerintahan dan organisasi non profit dapat bekerja dengan baik, meskipun demikian ia tidak bisa terlepas dari interaksi dan pengaruh lingkungan dimana organisasi publik itu berada.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan suatu kekuatan atau kekuatan suatu benda (Maryani & Nainggolan, 2019:1). Pemberdayaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan suatu item tertentu agar menjadi lebih maju, termasuk pengembangan kualitas sumber daya, baik alam maupun sosial. Pemberdayaan mendorong tumbuhnya suatu ide dan kreativitas dalam mengembangkan sesuatu.

Endah (2020: 137) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses yang mengarah pada pemberdayaan dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Proses mengubah masyarakat menjadi lebih baik

dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa upaya. Senada dengan hal tersebut, Widjaja dalam Endah (2020: 137-138) menyatakan bahwa esensi dasar pemberdayaan adalah upaya membangkitkan berbagai kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, motivasi, kesadaran, dan inovasi diperlukan peningkatan dan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Proses pemberdayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan banyak hal. Pemberdayaan didefinisikan tidak hanya sebagai proses penguatan tujuh kekuatan lemah, tetapi juga sebagai proses pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat sangat penting dalam pembuatan program pemberdayaan desa karena merupakan objek dan subjek (Kushadajani & Permana, 2020:71).

4. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instansi”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto : 2007)

- a. Tahap Penyadaran, dalam tahap ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki potensi dan hak untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, mereka juga didorong untuk memiliki motivasi agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dimulai dari diri sendiri. Proses ini dapat dipercepat dan hasilnya dapat dirasionalkan melalui pendampingan atau fasilitator yang membantu mencapai kemandirian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pengembangan potensi yang dimiliki.

- b. Tahap Pengkapasitasan, tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola peluang yang tersedia. Proses pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, dan kegiatan serupa yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat secara optimal.
- c. Tahap Pendayaan, masyarakat diberikan kesempatan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya melalui partisipasi yang aktif dan berkelanjutan. Mereka diberi peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka, serta aspirasi mereka diakomodasi. Masyarakat juga dibimbing untuk melakukan evaluasi diri terhadap pilihan yang mereka buat dan hasil pelaksanaannya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat

Indonesia umumnya dan masyarakat khususnya yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah mampu memandirikan dan memandirikan masyarakat (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007).

5. Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata adalah area yang menggabungkan atraksi, penginapan, dan fasilitas lainnya (Wihasta, 2012 dalam Maulana dkk, 2022). Unsur yang disajikan menjadi kesatuan dalam kehidupan masyarakat tanpa menghilangkan aturan dan nilai yang berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Menurut Prapita (2018:48) desa wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran, dan partisipasi masyarakat.

Pengembangan sebagai bagian dari pembangunan secara bertahap dan sistematis serta menjurus ke sasaran yang

dikehendaki (Amerta, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan menekankan pada fase menciptakan sesuatu menjadi lebih baik. Sehingga dapat diartikan bahwa pengembangan menjadi satu bagian dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Pengembangan desa wisata dapat disimpulkan sebagai usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki desa wisata baik dari fasilitas, kondisi lingkungan, dan akomodasi, agar sejajar atau lebih maju dengan desa wisata lainnya melalui pelibatan aktor-aktor terkait seperti pemerintah dan swasta.

6. Faktor Penghambat

Dalam suatu pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa faktor yang terkait pemberdayaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh Mardikanto (2013:188) menyatakan terdapat sejumlah faktor pendorong dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Sumber Daya Alam, sumber daya alam penting dalam pemberdayaan masyarakat, menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemanfaatan bijak dapat menciptakan peluang ekonomi, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan energi. Akses dan kontrol atas sumber daya alam oleh masyarakat lokal memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.
- b. Sumber Daya Manusia, sumber daya manusia penting karena kreativitas, kemampuan belajar, dan adaptasi mereka menghasilkan inovasi dan mengatasi perubahan lingkungan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan peran sosial memperkuat keterlibatan individu. Pemberdayaan juga melibatkan kesejahteraan dan kesehatan, akses pendidikan, dan layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup.
- c. Keadaan Kelembagaan, lembaga, termasuk pemerintahan dan badan

nirlaba, merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan memfasilitasi distribusi dana, pendidikan, serta infrastruktur. Lembaga pelatihan meningkatkan keterampilan, dan lembaga demokratis memungkinkan partisipasi masyarakat. Institusi keuangan memberikan akses ke modal. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menciptakan sinergi untuk pemberdayaan.

- d. Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana penting dalam pemberdayaan, memberikan aksesibilitas, mobilitas, dan fasilitas pelatihan, kesehatan, serta ekonomi. Infrastruktur teknologi dan informasi, serta fasilitas keamanan dan olahraga, menciptakan lingkungan stabil untuk pengembangan diri. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan memperkuat pemberdayaan.
- e. Kebijakan, kebijakan menciptakan kerangka kerja, aturan, dan pedoman yang

membentuk lingkungan pemberdayaan. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan menciptakan kesempatan, melindungi hak asasi manusia, mendorong kesetaraan, dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

- f. Organisasi dan Administrasi, organisasi dan administrasi membentuk kerangka kerja yang mendukung struktur, tujuan, dan distribusi sumber daya. Struktur organisasi mengelola sumber daya dengan efektif, sementara administrasi mengarahkan energi organisasi ke tujuan pemberdayaan. Distribusi sumber daya, komunikasi efektif, budaya yang mendukung, dan pengembangan sumber daya manusia menciptakan lingkungan yang mendorong kesetaraan dan keadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan fenomena sosial tertentu melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya melalui penyusunan sistematis, faktual dan akurat untuk menjelaskan hubungan dalam

lingkungan penelitian.

Penentuan lokus dalam penelitian ini bertujuan memudahkan peneliti menentukan objek dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti melakukan penelitian di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kelurahan Wonolopo, Kota Semarang. Penentuan fokus penelitian bertujuan memperjelas subjek penelitian dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti menentukan fokus penelitian yaitu tahap pemberdayaan masyarakat.

Subjek penelitian digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 5 (lima) informan yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Diantaranya Pegawai Disbudpar Kota Semarang, Kepala Kelurahan Wonolopo, Ketua Pokdarwis Manggar Selaras, dan masyarakat desa Wonolopo.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait menggunakan

pedoman wawancara (interview guide). Data sekunder diperoleh melalui sumber lain seperti jurnal, buku, maupun dokumendokumen pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Kualitas data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber.

F. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Desa Wisata Wonolopo pertama kali dibentuk sebagai salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Wonolopo. Dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Desa Wonolopo, pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun desa wisata yang berkelanjutan.

Melalui Keputusan Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelurahan Wonolopo dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Penetapan Kelurahan Wonolopo sebagai desa wisata diawali dengan motivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Wonolopo agar menjadi tempat wisata bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Terletak di Kecamatan Mijen, Desa Wisata Wonolopo dapat

ditemukan melalui jalan raya SemarangBoja arah Kabupaten Kendal. Desa Wisata Wonolopo dapat diakses oleh wisatawan menggunakan bus ke Boja dan Cangkiran atau Bus Trans Semarang.

Desa Wisata Wonolopo memiliki berbagai potensi baik yang berkaitan dengan alam, budaya, dan sebagainya. Wonolopo memiliki beberapa kampung tematik, diantaranya Kampung Jamu, Kampung Ranting Pelangi, Omah Ampiran, Embung Wonolopo, Kampung Flora, Kampung Sepak Bola, Go Green Jadoel, dan Kampung Organik. Selain itu masih terdapat homestay yang dimiliki Desa Wisata Wonolopo seperti Pendopo Kinanthi yang dimiliki oleh perseorangan.

Analisis tahap pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo dalam penelitian ini menggunakan komponen tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan untuk menganalisis pemberdayaan tersebut. Pemanfaatan potensi desa berupa edukasi mengenai budaya dan seni serta konservasi oleh warga desa Wonolopo yang sekarang berkembang menjadi desa wisata

merupakan keberhasilan dari POKDARWIS Desa Wonolopo dalam memanfaatkan budaya,keseniain serta tradisi yang membawa perubahan bagi warga desa Wonolopo yang memiliki pendapatan rendah dan terbiasa pergi merantau untuk mendapatkan penghasilan menjadi lebih berdaya dan mampu memajukan desa.

1. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

A. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat adalah langkah awal yang sangat penting, seperti yang dijelaskan oleh Wrihatnolo (2007). Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi lingkungan mereka, hak, dan kemampuan mereka. Di Desa Wisata Wonolopo, penyadaran dimulai dengan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Ide awal untuk mengembangkan desa wisata muncul dari salah satu anggota masyarakat yang terinspirasi setelah mengunjungi desa wisata di Yogyakarta. Ide tersebut kemudian disebarluaskan melalui forum-forum masyarakat seperti rapat RT/RW, menciptakan kesepakatan bersama untuk mengembangkan Wonolopo

sebagai desa wisata.

Sosialisasi merupakan langkah krusial dalam tahap penyadaran. Dalam konteks Desa Wisata Wonolopo, sosialisasi dilakukan oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) secara mandiri. Hal ini mencerminkan peran masyarakat sebagai fasilitator dan pelaku utama dalam proses pemberdayaan. Seiring waktu, sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus berhasil menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya potensi desa. Meskipun awalnya ada resistensi dari beberapa pihak termasuk kepala desa, keberhasilan sosialisasi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap potensi desa wisata dapat ditingkatkan melalui usaha bersama.

Pemberdayaan masyarakat Wonolopo juga ditunjukkan dengan pemahaman mereka mengenai tujuan desa wisata. Masyarakat secara bertahap memahami dan menerima ide desa wisata, meskipun pada awalnya banyak yang menolak. Pemahaman ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif masyarakat

dalam berbagai kegiatan pengembangan desa wisata. Pendapat dari Ketua Pokdarwis Manggar Selaras menegaskan bahwa meskipun ada resistensi awal, masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya desa wisata bagi kemajuan desa mereka.

Namun, meskipun tingkat pemahaman masyarakat telah meningkat, respon terhadap kegiatan desa wisata masih bervariasi. Beberapa warga mengakui adanya pengetahuan mengenai desa wisata tetapi tidak sepenuhnya menyambut kedatangan wisatawan luar. Hal ini menunjukkan bahwa selain penyadaran, perlu ada upaya untuk mengatasi kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat perubahan yang dibawa oleh desa wisata. Misalnya, masalah kemacetan yang disebabkan oleh bus-bus wisata perlu ditangani agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, tahap penyadaran di Desa Wonolopo telah dilaksanakan dengan baik, ditunjukkan oleh

sosialisasi yang dilakukan sebanyak empat kali dalam rapat rutin RT/RW. Meskipun demikian, respon masyarakat masih beragam. Beberapa anggota masyarakat belum menunjukkan dukungan terhadap adanya desa wisata Wonolopo, karena khawatir dengan kemacetan yang diakibatkan oleh banyaknya bus wisata dan kurangnya antusiasme terhadap manfaat yang ditawarkan.

B. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola peluang yang tersedia. Proses pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, dan kegiatan serupa yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat secara optimal. Pelatihan konsep manajemen sumber daya manusia yang melibatkan aktivitas instruksi yang direncanakan, seperti pelatihan prosedur operasi spesifik atau keahlian tugas dan program pengenalan pekerjaan.

Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya. Dalam konteks Desa Wisata Wonolopo, berbagai pelatihan telah diadakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan nilai dari desa wisata ini. Misalnya, pelatihan manajemen *homestay* yang diberikan oleh Disbudpar Kota Semarang bertujuan untuk mengembangkan usaha *homestay* di desa, yang penting untuk menarik wisatawan agar tinggal lebih lama. Pengelola Pendopo Kinanthi kemudian menerapkan ilmu dari pelatihan ini dalam praktik bisnis *homestay* yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, pelatihan website membantu mempromosikan pariwisata desa melalui digitalisasi, yang penting untuk menarik lebih banyak pengunjung. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam mengelola desa wisata.

Partisipasi masyarakat dalam pelatihan menjadi kunci dari proses pemberdayaan ini. Namun, partisipasi masih terbatas karena berbagai faktor seperti keterbatasan waktu, kesibukan sehari-hari, dan

prioritas individu. Hanya beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelatihan ini, seperti pengelola yang memiliki kualifikasi atau minat tinggi. Meskipun demikian, partisipasi yang aktif dan koordinatif dari mereka yang terlibat menunjukkan potensi untuk memberdayakan masyarakat lebih luas. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan konsistensi dan keterlibatan berkelanjutan dari seluruh masyarakat. Tanpa ini, ada risiko bahwa potensi Desa Wisata Wonolopo tidak akan terkelola dengan baik dan pemberdayaan masyarakat tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan komitmen masyarakat dalam proses pemberdayaan.

C. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini, masyarakat yang diberikan peluang sesuai kemampuan dan minat mereka merupakan upaya agar mereka berpartisipasi aktif secara sukarela tanpa paksaan dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pemberian daya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola

usaha. Proses pendayaan juga dapat dilakukan dengan menjalankan kegiatan sistem simpan pinjam. Adapun pendayaan yang diberikan untuk masyarakat Desa Wonolopo melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan desa wisata.

Demi tercapainya tujuan dari pengembangan Desa Wisata Wonolopo, pengambilan keputusan terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan desa wisata menjadi penting. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan diperlukan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Peran dan bantuan masyarakat dalam proses ini diperlukan agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sangat krusial, terutama dalam pembinaan dan pelatihan pada Pokdarwis Manggar Selaras. Pelatihan yang diberikan mencakup peningkatan SDM, pelatihan pemandu wisata, dan pelatihan inovasi sajian kuliner. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terus

melakukan pendampingan pembaruan SK.

Pengembangan Desa Wisata Wonolopo lebih banyak melibatkan masyarakat desa sebagai pemilik wisata, pemilik UMKM, dan kampung tematik. Masyarakat aktif tidak hanya sebagai pelaku wisata, tetapi juga melalui kelompok seperti Karang Taruna yang menjadi salah satu kelompok aktif dalam mengembangkan desa wisata. Berdasarkan hasil wawancara, pengembangan Desa Wisata Wonolopo tidak lepas dari pengambilan keputusan yang tepat dan dukungan masyarakat setempat.

Evaluasi sangat diperlukan dalam tahap pemberdayaan untuk mengidentifikasi kekurangan atau ide inovasi yang diperlukan, dengan fokus pada masalah kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Wisata Wonolopo. Partisipasi aktif dari seluruh komunitas merupakan kunci keberhasilan desa wisata, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. Sebagian masyarakat merasa bahwa kurangnya partisipasi dapat menghambat potensi pengembangan desa.

Partisipasi mencakup berbagai aspek, seperti keikutsertaan dalam promosi, pemeliharaan lingkungan, dan penyediaan layanan bagi wisatawan.

Kurangnya kesadaran akan manfaat partisipasi menjadi salah satu faktor utama rendahnya keterlibatan masyarakat. Pemahaman tentang peran dan dampak positif partisipasi masih kurang tersebar. Evaluasi dan diskusi rutin oleh pokdarwis bisa meningkatkan kesadaran ini, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat partisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

A. Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam merupakan faktor utama yang mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo. Tanah subur dimanfaatkan untuk agrowisata seperti menanam padi dan buah, yang menjadi atraksi menarik bagi

wisatawan sekaligus sumber pendapatan bagi warga. Sejak 2011, desa ini fokus pada wisata edukasi dan agrowisata, dengan perkebunan dan sawah tadah hujan sebagai basis pengembangan.

Namun, potensi sumber daya alam saja tidak cukup tanpa upaya pengelolaan yang optimal. Kampung Flora, misalnya, memanfaatkan tanaman hias dan buah-buahan sebagai atraksi wisata, dimana pengunjung dapat terlibat langsung dalam menanam dan memetik buah. Ini menciptakan nilai tambah dan pengalaman berharga bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui diversifikasi sumber pendapatan. Kendala yang dihadapi termasuk alih fungsi lahan dari sawah menjadi rumah hunian, yang dapat mengurangi potensi pertanian sebagai daya tarik utama agrowisata. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan kebutuhan mempertahankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi lainnya juga menjadi tantangan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala

ini dan memastikan potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan masyarakat.

B. Sumber Daya Manusia

Data menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Meskipun masyarakat terlibat dalam pengelolaan, keterbatasan waktu dan energi karena pekerjaan utama seperti bertani atau berdagang membatasi partisipasi mereka. Selain itu, keterbatasan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengurangi dukungan yang optimal. Kurangnya pelatihan dan akses terhadap teknologi modern menghambat inovasi, sementara kurangnya minat generasi muda dalam pengembangan desa wisata juga menjadi faktor penghambat. Partisipasi masyarakat juga terganggu oleh kesibukan mereka dengan pekerjaan utama, membuat inovasi dan kreativitas dalam pengembangan desa wisata tidak berkembang maksimal. Sumber daya alam Desa Wisata Wonolopo sudah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,

mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Namun, kualitas SDM yang belum optimal membatasi pengembangan pariwisata. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat seringkali kurang variatif dan tidak mencakup berbagai keterampilan yang diperlukan. Generasi muda lebih tertarik mencari pekerjaan di kota atau sektor lain, sehingga partisipasi mereka dalam pengembangan desa wisata minim. Kurangnya inovasi dan kreativitas menjadi tantangan utama, dan tanpa kontribusi mereka, sulit untuk membawa perubahan yang signifikan dan menarik bagi wisatawan. Upaya lebih dalam melibatkan dan melatih masyarakat diperlukan agar mereka mampu berinovasi dan berkreasi lebih baik.

C. Keadaan Kelembagaan

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa konflik internal dalam organisasi pengelola menjadi hambatan utama bagi perkembangan Desa Wisata Wonolopo. Perbedaan pandangan dengan pemilik lokasi menghambat pengambilan keputusan meskipun ada

pendampingan dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat terhalang oleh perbedaan prioritas yang tidak sejalan dengan konsep pemberdayaan partisipatif. Tantangan pemberdayaan masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah dalam pelatihan, pendanaan, promosi, dan fasilitas penunjang, yang mengurangi minat wisatawan. Percepatan perkembangan desa wisata memerlukan perhatian dan koordinasi lebih baik dari semua pihak terkait.

Keadaan kelembagaan menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo. Konflik internal antara dua kelompok sadar wisata, yaitu Pokdarwis Wonolopo dan Pokdarwis Manggar Selaras, serta perbedaan pandangan dengan pemilik Pendopo Kinanthi, menghambat pengembangan desa wisata. Pendopo Kinanthi menginginkan fokus pada pengembangan potensi sebelum mengejar hasil finansial, yang tidak selalu sejalan dengan anggota Pokdarwis lainnya. Ketidakselarasan ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan dalam Pergub Nomor 53 Tahun

2019, yang menekankan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal pelatihan, promosi, dan infrastruktur pendukung memperparah situasi.

D. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil pengumpulan data, sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama di Desa Wisata Wonolopo. Fasilitas pendukung seperti transportasi dan infrastruktur jalan yang rusak sangat terbatas. Hal ini menyulitkan wisatawan untuk menjelajahi desa dengan nyaman dan aman. Selain itu, kehadiran perumahan modern yang tidak sesuai dengan karakter desa mengurangi daya tarik alami. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk menyediakan transportasi yang memadai dan memperbaiki infrastruktur jalan. Kurangnya inovasi dalam pengembangan sarana dan prasarana disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang rendah dan minimnya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah sangat penting untuk menyediakan transportasi umum dan perbaikan infrastruktur guna meningkatkan minat wisatawan.

Menurut Mardikanto

(2013), faktor penghambat pemberdayaan masyarakat mencakup sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kurangnya fasilitas transportasi dan infrastruktur jalan yang rusak menjadi tantangan utama dalam mengembangkan Desa Wisata Wonolopo. Masyarakat setempat mengakui bahwa alat transportasi yang minim dan jalan yang rusak menghambat akses wisatawan. Partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya bantuan pemerintah juga menjadi hambatan besar dalam pengembangan desa wisata ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama yang erat antara masyarakat dan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan partisipasi, Desa Wisata Wonolopo dapat menjadi destinasi wisata yang menarik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

E. Kebijakan

Berdasarkan data, kebijakan bukanlah hambatan utama dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Meski ada kekurangan dalam implementasi, seperti kurangnya rincian program kerja

dan integrasi antara dua Pokdarwis, kebijakan seperti Surat Keputusan Plt. Walikota Semarang Nomor 556/407 tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 sudah memberikan panduan yang jelas. Kebijakan ini memperkuat struktur pengelolaan desa wisata dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan produk lokal, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, dan pelestarian kearifan lokal.

Menurut teori faktor penghambat pemberdayaan dari Mardikanto, kebijakan dapat menjadi pendorong atau penghambat pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Desa Wisata Wonolopo, kebijakan yang diresmikan melalui Surat Keputusan Plt. Walikota Semarang dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan desa wisata. Tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya program kerja spesifik dan integrasi antara pokdarwis, dapat

diatasi melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, Desa Wisata Wonolopo memiliki potensi besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

F. Persaingan Pasar

Desa Wisata Wonolopo menghadapi tantangan dari persaingan pasar yang ketat dengan desa wisata lainnya, baik yang berbasis alam maupun buatan. Meskipun tanpa keunggulan geografis seperti gunung atau air terjun, Wonolopo menonjolkan keunikan budaya dan program edukatif sebagai daya tarik utama. Persaingan ini sering menghambat pemberdayaan masyarakat karena rasa kurang percaya diri yang mempengaruhi motivasi untuk berinovasi dan berkembang. Selain itu, desa wisata buatan dengan fasilitas modern dan desa wisata alam dengan pemandangan menakjubkan menarik banyak pengunjung, membuat masyarakat Wonolopo merasa usaha mereka tidak akan memberikan hasil yang signifikan.

Untuk mengatasi persaingan ini, diperlukan

kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan atraksi wisata unik dan menarik. Masyarakat dan pemerintah desa dapat bekerja sama untuk menemukan dan mempromosikan keunikan lokal seperti wisata edukasi budaya, pertanian organik, atau kerajinan tangan khas desa. Dukungan dari pemerintah berupa pelatihan, pendanaan, dan promosi sangat penting untuk meningkatkan daya saing Desa Wisata Wonolopo. Kerjasama dengan desa wisata lain dalam bentuk paket wisata terpadu juga bisa menjadi strategi efektif. Dengan demikian, persaingan pasar dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik Desa Wisata Wonolopo serta memberdayakan masyarakatnya secara lebih efektif.

G. KESIMPULAN

Pada penelitian ini didapatkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo belum optimal. Tahap penyadaran telah dilakukan melalui sosialisasi formal dan non-formal oleh pengelola desa dan pemerintah desa, yang berhasil meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang konsep desa wisata dan dampak positifnya, seperti peningkatan nilai desa dan pendapatan masyarakat. Namun, masih ada perbedaan respon di antara masyarakat, dengan sebagian mendukung dan sebagian menentang desa wisata ini. Pada tahap pengkapasitasan, meskipun pelatihan telah dilakukan oleh dinas dan pelatihan mandiri lainnya, partisipasi masyarakat masih kurang karena belum terlibat secara masif dan konsisten, sehingga potensi desa wisata belum dikelola secara berkelanjutan. Upaya digitalisasi untuk promosi melalui website dan media sosial seperti Instagram sudah berkembang, namun tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah menjadi kendala utama.

Tahap pendayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan sesuai minat dan bakat mereka, dengan partisipasi aktif yang sangat diperlukan. Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan desa wisata untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan sesuai tujuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Semarang, Disporapar Jawa Tengah, dan Kelurahan Wonolopo berperan signifikan dalam pembinaan, pelatihan peningkatan SDM, dan pendampingan pengembangan desa wisata. Namun, evaluasi menunjukkan partisipasi aktif seluruh komunitas masih kurang, yang dapat menghambat potensi pengembangan desa wisata. Kesadaran akan manfaat partisipasi dalam promosi, pemeliharaan lingkungan, dan penyediaan layanan bagi wisatawan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengembangan desa wisata Wonolopo.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo belum berjalan optimal karena beberapa faktor penghambat. Pertama, sumber daya manusia dan koordinasi yang kurang baik antara Dinas terkait dengan Kelompok Sadar Wisata Wonolopo, seperti belum adanya arah penunjuk jalan yang seharusnya disediakan oleh Dinas Perhubungan, serta kurangnya perhatian Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap pembangunan

desa wisata ini. Kedua, perbedaan pandangan dan kepentingan antara Pokdarwis Manggar Selaras dan Pemilik Pendopo Kinanthi, yang menginginkan potensi desa dikembangkan lebih dulu daripada mencari hasil, mengakibatkan kemajuan desa wisata tidak merata dan terpecah-pecah. Ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti infrastruktur jalan yang rusak, perumahan modern yang menghilangkan keasrian desa, dan fasilitas pendukung yang belum memadai, seperti angkutan untuk berkeliling desa. Terakhir, persaingan pasar yang semakin meningkat dari desa wisata buatan dan desa wisata dengan keunikan alam yang lebih menarik, yang bisa mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan karena merasa usaha mereka kurang kompetitif.

H. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan agar permasalahan yang berkaitan dengan tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo dapat teratasi yaitu : pertama, untuk meningkatkan kualitas penyadaran, adakan sosialisasi formal tentang pembentukan desa wisata agar masyarakat memahami pengelolaan

dan pengembangannya secara detail. Gunakan media lokal dan libatkan tokoh masyarakat untuk efektivitas sosialisasi. Kedua, untuk meningkatkan kapasitas, libatkan masyarakat secara luas dalam kegiatan desa wisata dan manfaatkan teknologi seperti website dan media sosial untuk promosi. Ketiga, untuk meningkatkan daya, bentuk forum diskusi reguler untuk memperkuat komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta adakan kampanye edukatif tentang manfaat partisipasi. Selain itu, beberapa faktor penghambat perlu diatasi: Sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan koordinasi antara dinas terkait melalui tim khusus dan pertemuan rutin. Untuk kelembagaan, fasilitasi dialog terbuka antara pihak-pihak terkait dengan mediasi jika perlu. Perbaiki infrastruktur seperti jalan dan fasilitas pendukung memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Terakhir, kembangkan keunikan lokal dan daya tarik khas untuk menghadapi persaingan pasar, serta tingkatkan promosi melalui media digital dan kolaborasi dengan influencer wisata. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

rekomendasi dan saran bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan masyarakat.
- Nuryanti, W. (1999). *Heritage, Tourism and Local Communities*.
- Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai PariwisataBudaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). Pp 164-171. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.164-171>
- Pradana, R. (2016). Analisis Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang. *Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Priasukmana, S., & Mulyadin, R. M. (2013). Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi*, 2(1).
- Purnomo, S., Rahayu, E. S., Riani, A. L., Suminah, S., & Udin, U. (2020). Empowerment model for sustainable tourism village

- in an emerging country. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 261–270.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.261>
- Putri, N. I., & Yuniningsih, T. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 40-50..
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Sumaryadi, I
 Nyoman,(2005).Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat.hal.155-156
- Susana Nurhasanah, I., Neilulfar Alvi, N., & Persada, C. Perwujudan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. I. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. *Sustainability*, 11(9), 2506.
- Yatmaja, P. T. (2019). Efektivitas pemberdayaan masyarakat oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(1), 27-36.
- Zakaria, F., & Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2).
- Wahyuni, S. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL TIKAR MENDONG (Studi pada Pengrajin Tikar Mendong Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Suharto, Edi. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Lesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Hermawan, Y., Hidayatullah, S., Alviana, S., Hermin, D., & Rachmadian, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wisata Edukasi dan Dampak yang Didapatkan Masyarakat Desa Pujonkidul. *Edusia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Asia*, 1(1).
<https://doi.org/10.53754/edusia.v1i1.21>

Landasan Hukum

UU Nomor 10 Tahun 2009

Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407 tahun 2012

Surat KeputusanKadisbudpar No.556/3598 TGL 15 November 2017

Pergub Nomor 53 Tahun 2019

Perda Nomor 2 Tahun 2019

